

R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2016



TENTANG

**MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT
KE-71 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 DAN
PENGANTAR/KETERANGAN RAPBN TAHUN 2017
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

**MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 71
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 DAN
PENGANTAR / KETERANGAN ATAS RAPBN TAHUN 2017
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

Hari : SELASA
Tanggal : 16 AGUSTUS 2016
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan HUT ke- 71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016;
 3. Skors;
 4. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya;
 5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil MZ
2. Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 26 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 19 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Dinas, Bagian, Kantor dan Camat se Kabupaten Rembang, dan
Yang saya hormati	Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 Kabupaten Rembang, Rekan-rekan Wartawan, LSM, Tokoh Masyarakat dan Undangan lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa , yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD untuk mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang dengan agenda pokok ” *Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*

dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016” dilanjutkan dengan ” Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya.

Rapat Paripurna Istimewa ini adalah terjadwalkan oleh Badan Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan memperhatikan Rancangan susunan acara Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-71 Kemerdekaan RI dan Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Penyampaian RUU APBN Tahun 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Pada Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten disebutkan bahwa “Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan”. Dengan demikian Rapat Paripurna ini dalam pelaksanaannya tanpa memperhitungkan jumlah anggota yang hadir.

Untuk itu, dengan mengucap ” *Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 10.15 WIB Rapat Paripurna Istimewa hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Tanggal 17 Agustus 2016, bangsa Indonesia memperingati Indonesia merdeka yang ke- 71, hari yang bersejarah, tak pernah dilupakan, selalu dikenang, diperingati karena mulai tanggal tersebut Indonesia lahir, Indonesia yang bebas dari cengkeraman penjajah menindas dan merampas hak azasi bangsa Indonesia waktu itu.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah semata-mata pemberian dari bangsa lain, namun kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah SWT disertai perjuangan yang mati-matian tak kenal lelah, tak pantang mundur, tak putus asa, semuanya demi Indonesia yang tercinta ini. Para penjajah bersenjatakan serba lengkap dan modern, tetapi pejuang kita hanya menggunakan senjata tradisional, yakni bambu runcing. Walaupun tidak imbang tentara yang dihadapi pejuang kita, namun semangat berkobar membara pejuang kita terus maju, maju, dan maju, tak selangkahpun mundur. Beliau bersemboyan lebih baik mati dari pada diinjak-injak penjajah.

Sebagai bangsa Indonesia hendaknya kita mengetahui liku-liku perjuangan untuk merebut tanah air Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus hendaknya merasa bangga dan selalu menghargai jasa-jasa bilau para pejuang, yang banyak mati di medan perang demi kemerdekaan Indonesia yang tercinta ini.

Dengan meneladani dan mengambil nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan dari para pejuang, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan bekerja giat sesuai profesi masing-masing, saling bersatu padu bahu-membahu antar pemangku kepentingan dan semua elemen masyarakat, demi terwujudnya Kabupaten Rembang yang maju dan sejahtera, sebagaimana Sub Tema yang dicanangkan yaitu : “ Dengan Semangat

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Mari Kerja Nyata Bersatu Padu dalam Membangun Rembang Madani dan Sejahtera”.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terdapat beberapa hal yang dapat saya sampaikan :

Yang pertama : kami segenap pimpinan dan anggota mengucapkan selamat Hari Pramuka yang Ke – 55 yang diperingati pada tanggal 14 Agustus 2016 kemarin, semoga pramuka semakin eksis di dalam membentuk pribadi dan karakter generasi penerus. Amin.

Yang kedua : kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Rembang di Tahun 2015 dan Tahun 2016 selama ini, yaitu :

1. Pendamping dan Operator Terbaik pada PKH AWARDS Tingkat Nasional Tahun 2015 kategori kerjasama;
2. Sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Madya Tahun 2015;
3. Desa Kalitengah Pancur sebagai Nominator Juara Ternak Sehat Tingkat Jawa Tengah Tahun 2015;
4. Kelompok Tani Ternak Kambing Domba “ Karya Utama “ Sedan sebagai juara 2 Tingkat Nasional;
5. Medali Mas MTQ Tingkat Nasional ke-26 Tahun 2016 di Nusa Tenggara Barat atas nama Durrotul Muqoffa dan Siti Mas’udah ;
6. Kelompok Sadar Wisata Desa Karangturi Kecamatan Lasem sebagai juara umum lomba Pokdarwis Tingkat Jawa Tengah.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara pokok dalam rapat paripurna istimewa hari ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna ini, yaitu :

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangkaperingatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016;
3. Skorsing (Sampai Pukul 14.00 WIB)
4. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya.
5. Penutup.

Selanjutnya kita masuki acara kedua yang merupakan agenda pokok yang pertama hari ini, yaitu ***"Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016"***.

Untuk keperluan tersebut maka rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Penjabat Bupati, Forkompinda dan rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

**=====MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-71 =====**

- *(Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016, semoga yang disampaikan oleh beliau Bapak Presiden dapat kita pahami, serta dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing untuk mencapai keberhasilan terhadap pembangunan di Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Sehubungan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya dilaksanakan pada Pukul 14.25 WIB, maka Rapat saya skors sampai pukul 14.00 WIB.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya kita masuk acara pokok yang kedua yaitu ”*Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya*”.

Untuk keperluan tersebut maka rapat saya skors kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Penjabat Bupati, Forkompinda dan rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

**=====PENYAMPAIAN PENGANTAR / KETERANGAN
PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TAHUN 2017
BESERTA NOTA KEUANGANNYA=====**

- *(Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Demikian telah kita dengarkan bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Peserta Rapat yang saya hormati.

Demikian rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada hari ini, terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Sebelum saya akhiri, untuk mengenang dan tetap menumbuhkan kebanggaan dan semangat kecintaan kita terhadap perjuangan para pendahulu kita, marilah kita kumandangkan pekik kemerdekaan sebagai motivasi dan penggugah semangat juang kita : ..**"MERDEKA"** !!
(*berteriak sambil mengepalkan tangan*).

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil'alamin*" tepat pukul 16.05 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Sekian.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,

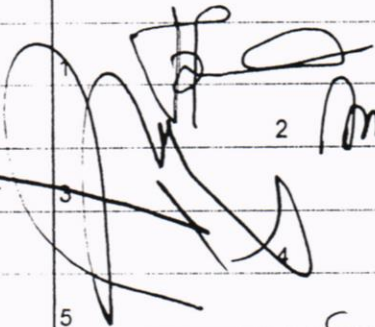
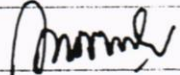
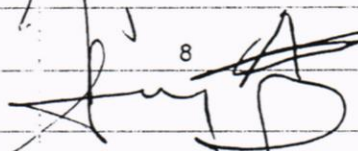
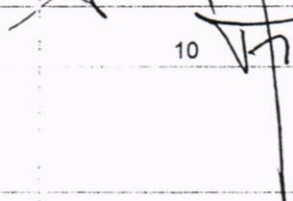
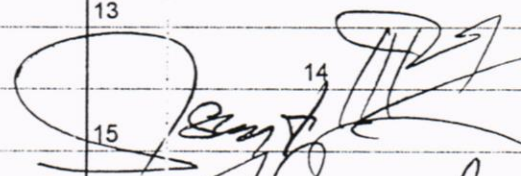
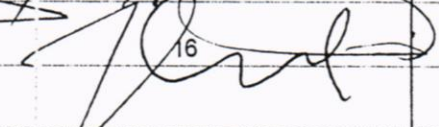
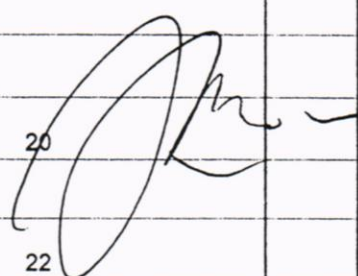
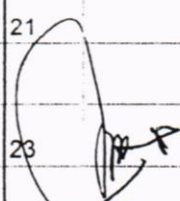
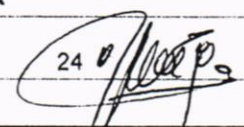


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT
KE- 71 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 DAN PENGANTAR / KETERANGAN
ATAS RAPBN TAHUN 2017 BESERTA NOTA
KEUANGANNYA**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka
Peringatan HUT ke - 71 Kemerdekaan Republik
Indonesia Tahun 2016;
- LAMPIRAN III : Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka
Penyampain/ Keterangan atas RAPBN Tahun
2017 beserta Nota Keuangannya.

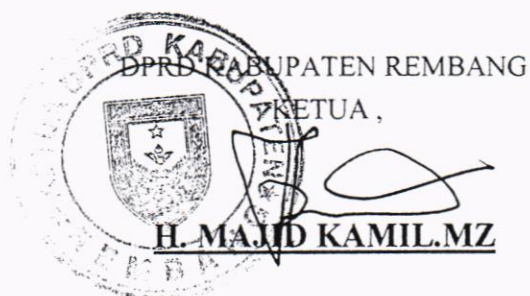
DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA PERINGATAN
HUT KEMERDEKAAN RI KE 71 DAN PENYAMPAIAN RUU TENTANG APBN TAHUN 2017
BESERTA NOTA KEUANGAN
HARI/TANGGAL : SELASA , 16 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3 	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16 	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22 	
23	WASIMAN	Anggota	23 	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24 	

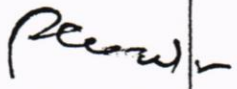
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

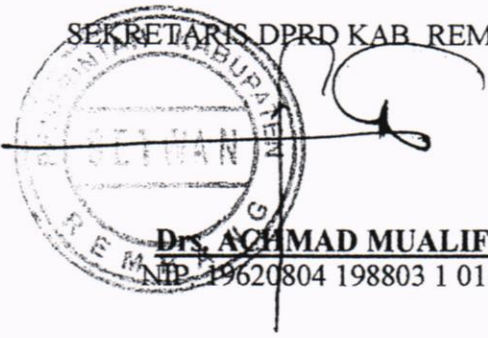
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 71 DAN PENYAMPAIAN RUU
TENTANG APBN TAHUN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN
HARI : SELASA , 16 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

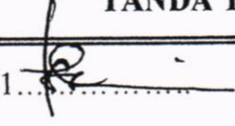
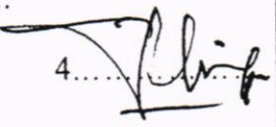
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.....
3	<u>XUUR ROHMAN</u>	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	<u>Bambang S</u>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<u>DARMAWAN S</u>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<u>PRANANDYA S</u>	^{waka} Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<u>ILHAM SUHROWARDI</u>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekretaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 71 DAN PENYAMPAIAN RUU
TENTANG APBN TAHUN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN
HARI : SELASA , 16 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Danramil Rembang	SULARSO	1. 
2	Danramil Kaliori	Wardiyana	2. 
3	Danramil Sumber		3.
4	Danramil Sulang	Putrisari	4. 
5	Danramil Bulu	Herpro E.	5. 
6	Danramil Pamotan		6.
7	Danramil Gunem		7.
8	Danramil Sale	RASYONSO	8. 
9	Danramil Lasem		9.
10	Danramil Pancur		10.
11	Danramil Sedan		11.
12	Danramil Sluke	Sumigah	12. 
13	Danramil Kragan		13.
14	Danramil Sarang		14.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 71 DAN PENYAMPAIAN RUU
TENTANG APBN TAHUN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN
HARI : SELASA , 16 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Kapolsek Rembang	SUNARMIN	1
2	Kapolsek Kaliori	DAMIN	2
3	Kapolsek Sumber		3
4	Kapolsek Sulang	Haryanto, SH	4
5	Kapolsek Bulu	R. SOSIYANTO, SH, MSI	5
6	Kapolsek Pamotan	KISWORO	6
7	Kapolsek Gunem	ADH	7
8	Kapolsek Sale	SNATH, SH	8
9	Kapolsek Lasem	EKO BUDI, S, SH	9
10	Kapolsek Pancur	SUWARNO	10
11	Kapolsek Sedan	Joko Purnomo	11
12	Kapolsek Suke		12
13	Kapolsek Kragan	Siswanto, S. SOS	13
14	Kapolsek Sarang		14

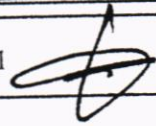
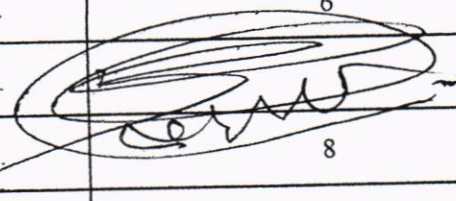
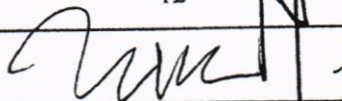
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIE
NIP. 19620804 198803 1 011

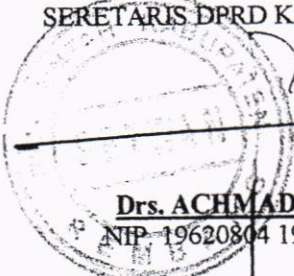
DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 71 DAN PENYAMPAIAN RUU
TENTANG APBN TAHUN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN

HARI : SELASA , 16 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1 
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG	B. Suryanto	4 
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM	TEGU M. G	7 
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Juharto	10 
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	H.M. Mardiyanto	12 
13	CAMAT KRAGAN	PESIAS	13 
14	CAMAT SARANG		14

SERETARIS DPRD KAB. REMBANG

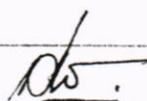
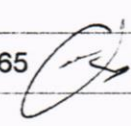

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 71 DAN PENYAMPAIAN RUU
TENTANG APBN TAHUN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN

HARI : SELASA , 16 AGUSTUS 2016
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Effendi	SA B	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Subhan	As I	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Jauhari	As III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Ikhsan	Bg Tata	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johan SW	Bg Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gautama		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Subanto	Bag Org	15
16	BAG. UMUM	Sumarto	Bag Umum	16
17	DPPKAD	Murti	Kadit	17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	18
19	BAPPEDA	Dripanto	Septaris	19
20	BPMPKB	Dr. W.	Ka B/M plan.	20
21	B K D	Supremi		21
22	BKP & P4K	Dwi Purwanto	Ka Bada	22
23	B P B D	Subianto	Ka Lul	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Yusyo	Kadit	24
25	DINAS KESEHATAN	Ali Rofii	Ka R	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Noor Effendi	PH Kalutis	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Suratman		28
29	DINLUTKAN	Sidarmou	Ka Disalut	29

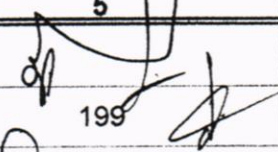
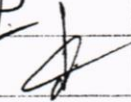
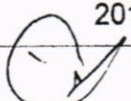
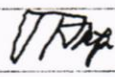
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DISHUBKOMINFO	Suryono	Kab. Rembang	30
31	DINAS DUKCAPIL	Moh. Daemir	Kadis	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. W. L. Uyo	KADIS	32
33	DINBUDPARPORA	SURYANING	Sek	33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryasa	Sekdin	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Puandhi S	BLH	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO		36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi Winarto	Pustanp	37
38	KANTOR KPPT	Eri Sugiyanti	Ka KPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Dedy	Rpd.	39
40	SATPOL PP	Siaceo Rendi	Kasat pol / pp	40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	M. STIFAN	Dir	42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sihom Gung		43
44	PD. BANK PASAR	M. Suni Mansur	Dieler	44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Agus Setyo Budi	Kepi Pin cab	45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

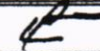
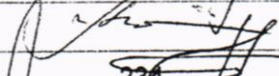
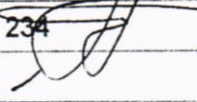
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN	MURDINUS		64 
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG	Munawar Supri		65 
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Dinkubling	Jessicamari	Kabid	96
97	D. W. R. I	A. Masrudi		97
98	Sri Gunawigati/SMA3	Sri Purnegara	Kas	98
99	SMA 2 Rembang	Sumarno	K. S	99
100	SMPN 1 Rembang	Sriyitno	Humas	100
101	SMPN 3 Rembang	Suliyono	KS	101
102	Pegadaian cab. Rbg	Agung Rahmoyo	Kepala Cab.	102
103	Kanminut cad IV/26/Rbg. Mayor M. S.	May M. S.	Kepala	103
104	BREKHOSON PANGRAKTI Rbg	SUKMIN	Ka Bala	104
105	SMA Kartini Rembang	Kindori	Guru	105
106	SUKARAJA POLRES	SUCARDI	KBg R	106
107	SAKSI BAKI	BURDIA	Secretary	107
108	Dintan hat	Nurhidayah		108
109	BK 2 Rbg	Chicika	Kabid	109
110	Praetika/Capil	Hindayani	Kab	110
111	SMPN 5 Rbg	Sri Harini	KS	111
112	Guru 6 Rbg	Bud. S.	KS	112
113	SMP 1 Rbg	Erigeris D	KS	113
114	Imam TS.	EDM	Kabid	114
115	Harigadi	BPB 1)	Ka. B. g	115
116	PKR Rembang	Jumanto	Ketua	116
117	Kodim 0720/Rbg	Ruzdi	Posi ap 5	117
118	Dinas Kelantan & Pontianak	Mardani	Kabid	118
119	SUPARTI SMPAR	Suparti	PL	119
120	Sofya chokir	Dinkubling Rbg	Kabid	120
121	SMP N 2 Rbg	A. MAFRIKIN	K. TU.	121
122	Baki "MAGOMUKSI" Rbg	Eddy Harjanto	KO.	122
123	BIDANG SOA DPU Rbg	Genro Wiyono	Kabid	123
124	DPD Bid. Cipta Karya	P.R. AH SETADI	PL. Kabin	124
125	BKP & PAK Rbg	Podjo Caksono	Kabid SDM	125
126	BK 2 Rbg Bakti Rbg	ARITIN. W	Kabid. Pubuk	126
127	Harji BPBD	Harji	Kabid	127
128	PAMUDJI DINKUBLING	PAMUDJI	Kabid	128
129	Andi Dimydo	Dinkubling	Kabid	129

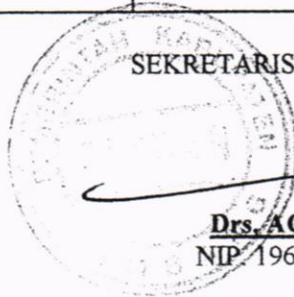
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
130	MON Dep	H. M. M. C. A. K. A. N.		130
131	Donlukhan	Moh. Sobyan	Kabid	131
132	Suwarno	Donlukhan	Kabid	132
133	SMK Yos Sudarso	Ch. Sri Widaryanti	WKS,	133
134	Donlukhan	Sarjono	Kabid	134
135	Wadaglas	K. S. S. K. A. L. I.	Cekrit	135
136	ENDU	Mu	Kabid	136
137	M. Rokhim	Donlukhan	sch	137
138	M. Rokhim	Donlukhan	Kabid	138
139	ASROLI	ASROLI	INDOK	139
140	CAPIC			140
141	M. P. d. R. M. H. A. N.	A. R. H. I. M. O. N. G.	Kabid	141
142	AQUS RUMANTO	PPP Tarikagung Dinkab	Kasubag	142
143	D. N. K. A. R. I.	Y. S. S. I. S. K. A. N.	Kabid	143
144	Dinperindagkap	Sugiyanto	Kabid	144
145	PLANAR	D. N. K. A. R. I.	KABID	145
146	Bafpoda	M. W. A. J. A. N.	Kabid	146
147	BAPRODA	D. E. R. E. V. N. E. T. I. N.	KABID	147
148	BKP dan Pak	Sri Prabandari	Kabid	148
149	BKD KAB. REMBANG	SRI PRABANDARI	KABID	149
150	SMK BINA MANTIK	H. S. K. A. N. T.	Kabid	150
151	Argunawati	Argunawati	Kabid	151
152	Rambang R.	BKD	Kabid	152
153	Binas Pendidikan	Winarnu K	Kabid	153
154	BKD	MARSON C	KABID	154
155	RSU	P. H. A. N. I.	Kabid	155
156	PPMUD	H. A. R. I.		156
157	Infan. f	Kodim 0720		157
158	Agung S.	R. S. I. A. R. A. F. A. H.		158
159	Sumitran	D. R. K. A. N.	K. A. R. I.	159
160	Sutartik	D. I. N. D. U. K. C. A. P. I.	KABID Copil	160
161	JOSEPH WISUNO	BPN		161
162	Abdul Malek	M. A. R. I. A. S. A. L. I.		162
163				163

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
164	Skand Haryanti	Bpupren		164
165	DINDIK	MUTAQIN		165
166	Dinar. Juwaidun	MAKDI		166
167	Budi Yono	Budi Yono		167
168	Soemarno	DEMOCRAT		168
169	Aqua or	COLICAN		169
170	Agus Haryanti	RAUD		170
171	Fery Sumardi	Imman		171
172	Budi Setian	TP. PAK		172
173	BPMPKB	Periyadi		173
174	Peternah	Agus H H		174
175	KARSONO	LESTING		175
176	BPMPKB	SUGIHARTO		176
177	BPMPKB	AGATINI	sekrut	177
178	BPMPKB	Rusmiyah	Kabid PPA	178
179	DINLUKAT	BUDIYONO	sekrut	179
180	BLH	Prastoko		180
181	BPMPKB	SPU SURYANDARI	Kabid	181
182	BPMPKB	Edy Kambay	Kabid	182
183	Rusmiyah	BLH	Self	183
184	Andreas RY	BLH	Kabid	184
185	BPMPKB			185
186	DPU RA	KUDADO	Bina Marga	186
187	Abel	PAL. Lsi	Wk tero	187
188	BPMPKB	Triyanto Int	sekr	188
189	PSUD dr DSOETASNO	Biri Saputra	Kabid	189
190	Enaini	BPS	Subag TM	190
191	Supriyo Utomo	Dinkes	sekrut	191
192	Dinas Kulture	Dni Martono	Kabid	192
193	DIN SOSIALISASI	PRABO. K		193
194	RS. dr. Soetrasno Rbg	Latsmi dr.	Kabid YMK	194
195	Kodim	Agus	Int	195
196	DJAWO P	Impektorat	Sekur	196
197	G...		Int. I	197

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
198	Kesuma Endro	Wibisono II		198 
199	SMK Al-Mubassir	Nuril Hayati S.		199 
200	D Nurani H	Dek		200 
201	D Kurniati	~		201 
202	Dikdik Sem	~		202 
203	HARIYANTO	KODIM		203 
204	Maslichon	STIE 'YOPPI'		204
205				205
206				206
207				207
208				208
209				209
210				210
211				211
212				212
213				213
214				214
215				215
216				216
217				217
218				218
219				219
220				220
221				221
222				222
223				223
224				224
225				225
226				226
227				227
228				228
229				229
230				230

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	5
231	Lab'ipul acun	Ke Bg Remang	231 
232	Wianah	Setwa	232 
233	Jantoto	Penyer	233 
234	Margona	Achra	234 
235	Rendi P		235 
236			236
237			237
238			238
239			239
240			240

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

PIDATO KENEGARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 71 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;
Yang saya hormati Bapak Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan,
Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah badannya! Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu sudah disampaikan bahwa Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional.

Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi sekarang ini.

Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era di mana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia.

Sampai sekarang ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,91%. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18%. Pertumbuhan itu jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.

Sementara itu, tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah, misalnya, berdampak pada ketidakstabilan kawasan dan memicu perluasan aksi terorisme di dunia termasuk di Ibukota negara kita.

Masih segar dalam ingatan kita, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, teroris mencoba menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun mereka gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita sebagai sebuah Bangsa sangat kuat.

Masyarakat dunia pun memuji kecepatan, respon, dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: *Pertama*, percepatan pembangunan infrastruktur. *Kedua*, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. *Ketiga*, deregulasi dan debirokratisasi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.

Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m, atau sebanyak 160 jembatan. Pada tahun 2016 target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m.

Pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai sekarang, jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang 5.200 kilometer Spoor (Km'sp).

Di tahun 2015, 179,33 Km'sp telah selesai dibangun dan 271,5 Km'sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu juga sedang dibangun kereta untuk transportasi perkotaan, seperti Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), serta commuter line.

Untuk program Tol Laut, Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan non-komersil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016.

Ini untuk mewujudkan gagasan kita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Lautan adalah masa depan bangsa, Jalesveva Jayamahe.

Pembangunan dan pengembangan bandar udara juga kita percepat sebagai wujud pembangunan Jembatan Udara. Di tahun 2016, Sembilan bandar udara telah dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi, dan enam bandar udara telah resmi dibuka pada tahun 2016. Dalam hal jalur penerbangan, Pemerintah telah menemukan solusi untuk mengatasi kepadatan jalur penerbangan Utara Pulau Jawa. Dapat saya sampaikan bahwa perencanaan untuk membuka jalur penerbangan Selatan Pulau Jawa sekarang ini sudah dimulai.

Perihal penyediaan listrik, program 35.000 MW terus dipacu. Program 35.000 MW kita pantau secara ketat dan cermat. Kita ingin memastikan program ini terlaksana dengan lancar dan dapat mencapai target rasio elektrifikasi 100% di tahun 2019.

Ketika itu terjadi, Indonesia akan bebas dari byar-pet. Usaha kecil dan industri rumah tangga dapat berjalan lancar dan anak-anak dapat belajar di malam hari dengan penerangan lampu listrik yang memadai.

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air. Pada tahun 2016 ini, dilakukan percepatan penyelesaian 22 waduk yang sedang dibangun, 8 waduk baru, 387 embung/situ baru, dan rehabilitasi 71 embung/situ.

Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan.

Kemudian, untuk mempercepat lahirnya inovasi-inovasi teknologi informasi dan menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur telekomunikasi. Dari segi modernitas, Pemerintah telah mengaktifkan teknologi 4G. Sedangkan untuk jangkauannya, Pemerintah meneruskan pembangunan Palapa Ring yang telah menghubungkan 400 Kabupaten/Kota dengan jaringan serat optik di tahun 2015.

Sampai dengan April 2016, telah diselesaikan tahap persiapan dan sudah siap dilaksanakan pembangunan Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah untuk menjangkau makin banyak daerah di Tanah Air.

Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan akan rumah bagi masyarakat, tahun 2016 ini Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah. Sebanyak 700.000 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 300.000 rumah untuk non-MBR.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan, daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN.

Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp 410,2 Triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp 347 Triliun. Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp 764 Triliun.

Selain itu, dengan dukungan penuh dari DPR, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Diharapkan, basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.

Hadirin yang terhormat,

Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara semakin sengit.

Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang.

Terkait dengan itu, Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM.

Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22% menjadi 12% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9% pada tahun 2016.

Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR. Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan 'holdingisasi'.

Secara khusus Pemerintah Pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia. Termasuk, kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sidang yang terhormat,

Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM adalah agar setiap insane Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Selanjutnya, dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa.

Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terus meningkat. Sampai bulan Juli 2016, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan mencapai 20.239 fasilitas. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebanyak 1.910 fasilitas, apotik sebanyak 1.953 fasilitas, dan optikal sebanyak 938 fasilitas.

Di sektor pendidikan, sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan nonformal, termasuk untuk mendapatkan keterampilan dari lembaga kursus/BLK.

Selain itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan karakter pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdikan di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.

Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas.

Wujud nyatanya adalah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa 96% perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari paket-paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016. Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.

Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.

Sidang yang saya hormati,

Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.

Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima.

Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Bukan reformasi tambal sulam. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif.

Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.

Selain itu dalam rangka menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan luar biasa.

Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat.

Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.

Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjangkauan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan lain-lain.

Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui jalur dialog maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.

Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.

Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri. Melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, kita berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Hingga akhir Juli 2016, 7.555 kasus WNI di luar negeri berhasil diselesaikan, sebagian besar dari jumlah tersebut adalah TKI. Pada kurun waktu yang sama, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara.

Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Kita bersyukur sekarang ini kerja sama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.

Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, Pemerintah bersama-sama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.

Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdikan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri.

Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan.

Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari hambatan kemajuan Indonesia justru datang dari diri kita sendiri. Padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh sebab itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang.

Hadirin yang saya muliakan,

Di akhir Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat ini, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerja sama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu terjadi.

Oleh sebab itu, apapun bidang yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana. Menuju kemajuan Indonesia Raya!

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

**PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
PENGANTAR/ KETERANGAN RAPBN TAHUN 2017
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya hormati.
Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, siang ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya Tahun Anggaran 2017.

Atas nama Pemerintah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi DPR-RI atas berbagai masukan yang diberikan dalam pembicaraan pendahuluan beberapa waktu lalu. Dengan masukan-masukan itu, Pemerintah dapat menyusun RAPBN Tahun 2017 yang semakin berkualitas.

Insyallah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat bagi seluruh rakyat dan dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam persaingan global, serta semakin mampu menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,
RAPBN Tahun Anggaran 2017 disusun di atas fondasi apa yang telah kita capai pada tahun 2015 dan perkembangan faktual pada tahun anggaran 2016. Pada tahun 2015, kita telah membangun fondasi dengan melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif, kita ubah menjadi produktif. Selain itu, kita juga mulai meletakkan paradigma Indonesia Sentris, dimana pembangunan tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh Tanah Air.

Tanpa keberanian melakukan lompatan paradigma tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kuat dan kokoh. Selanjutnya, memasuki tahun

2016, Pemerintah ingin bergerak lebih cepat dengan mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan.

Langkah percepatan itu dilakukan antara lain melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, yang telah dimulai pada triwulan keempat sebelum tahun anggaran berjalan. Selain itu percepatan juga dilakukan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, sebagai upaya percepatan penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Langkah perbaikan proses penganggaran juga dilakukan secara lebih komprehensif guna mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBN serta APBD tepat sasaran. Pemerintah juga menjaga APBN tetap sehat, berkualitas dan kredibel. Pemerintah terus mengefektifkan belanja pemerintah, menjaga kepercayaan pasar serta memperbaiki iklim usaha.

Pada semester kedua tahun 2016, Pemerintah melakukan langkah konsolidasi fiskal untuk mengamankan pelaksanaan APBN-P, menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha, serta menjadi basis perencanaan fiskal dan pembangunan yang lebih realistis di tahun 2017. Alokasi penganggaran lebih diprioritaskan pada upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja.

Sejalan dengan itu, dilakukan penghematan terhadap belanja operasional dan belanja barang. Hasil penghematan itu selanjutnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan prioritas, terutama untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memberikan stimulus kegiatan perekonomian.

Berbagai langkah Pemerintah untuk menjaga stimulus fiskal di tengah tekanan melambatnya laju perekonomian global, telah mulai menuai hasil. Pada Triwulan Kedua 2016 ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan Pertama 2016 yang hanya tumbuh 4,91 persen. Pada Triwulan Kedua 2016, sektor-sektor terbesar seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan Triwulan Pertama 2016.

Di sisi lain, inflasi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat, relatif terkendali. Laju inflasi Juli 2016 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2015, tercatat sebesar 3,21 persen. Sehingga inflasi kumulatif bulan Januari sampai Juli 2016 sebesar 1,76 persen. Realisasi inflasi Juli tahun ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir.

Indikator kesejahteraan sosial Indonesia dalam dua tahun terakhir ini juga terus menunjukkan peningkatan. Data pada Maret tahun 2016 menunjukkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio juga berhasil dikurangi menjadi 0,40. Dan tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 5,5 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami kemajuan hingga mencapai angka 69,55 pada tahun 2015. Namun demikian, perlu disadari bahwa kita masih akan menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan.

Belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang diiringi masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional.

Di samping itu, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi. Sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,
Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja. Dalam mendukung hal tersebut, APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Untuk itu, RAPBN tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. *Pertama*, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Saudara-saudara yang saya hormati, Dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah mengajukan asumsi ekonomi makro tahun 2017 sebagai berikut.

Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik. Meskipun, kita harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan. Namun demikian, dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kedua, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen. Penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas. Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin.

Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. Upaya penguatan di sektor keuangan dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen. Reaksi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi harga minyak pada tahun 2017.

Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780.000 barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel.

Hadirin sekalian yang saya muliakan, RAPBN tahun 2017 disusun dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Adapun kebijakan strategis dalam RAPBN 2017 adalah sebagai berikut:

Penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian. Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal

untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, di sisi belanja negara, kebijakan strategis yang kita rumuskan antara lain: *Pertama*, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan. Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayanan rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.

Kedua, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera. Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima.

Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. Semua upaya ini untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan.

Keenam, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam penegakan hukum, kita akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme. Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
Dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2017 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun.

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.

Dengan berbagai agenda dan sasaran pembangunan yang saya sampaikan tadi, maka kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB.

Secara umum, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah, dan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali.

Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Demikianlah, penjelasan saya mengenai Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2017. Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN beserta Nota Keuangannya Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan rakyat, Pemerintah dapat bekerja lebih baik, bekerja lebih efektif dalam mencapai kemajuan bersama.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita semua, untuk berjuang mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, menjadi bangsa pemenang yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.